

BAB IV

PERKEBUNAN TEH GUNUNG MAS MASA PT

PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TAHUN 1996 – 2014

A. Dari PT Perkebunan Menjadi PT Perkebunan Nusantara

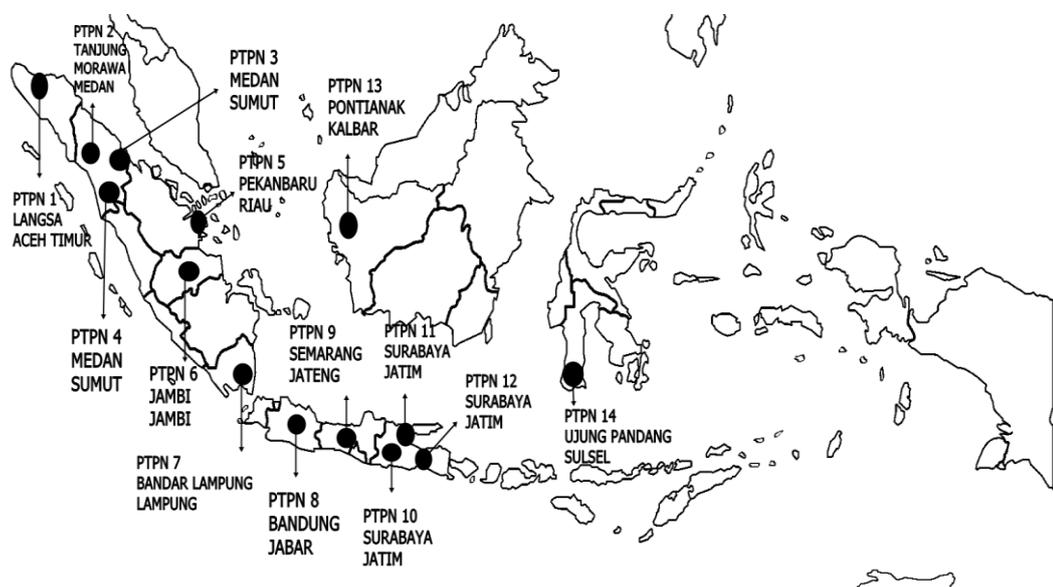
Pada 1 April 1994 sampai dengan tanggal 10 Maret 1996, adanya restrukturisasi perkebunan milik BUMN yang pengelolaannya dipegang oleh PT Perkebunan (PTP). PTP yang terdiri dari PT Perkebunan XI, PT Perkebunan XII, dan PT Perkebunan XIII digabungkan dalam manajemen PTP Group Jabar. Namun, tanggal 11 Maret 1996, PT Perkebunan XI, PT Perkebunan XII, dan PT Perkebunan XIII dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta Notaris Harun Kamil, S.H., No. 41 tanggal 11 Maret 1996.¹ PTPN ini memiliki 14 cabang diseluruh Indonesia, antara lain:

1. PTPN I hingga PTPN VII memiliki wilayah kerja di pulau Sumatera dengan komoditas unggulannya yaitu kelapa sawit, karet, kakao, tembakau, dan teh.
2. PTPN VIII hingga PTPN XII memiliki wilayah kerja di pulau Jawa dengan komoditas unggulannya yaitu kelapa sawit, karet, buah, kakao, etanol, tembakau, kopi, kayu, dan teh.

¹ Diperoleh melalui <http://www.pn8.co.id> (diakses pada tanggal 11 Juni 2017, pukul 20.05 WIB)

3. PTPN XIII memiliki wilayah kerja di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan komoditi unggulannya yaitu kelapa sawit dan karet.
4. PTPN XIV memiliki wilayah kerja di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) dengan komoditi unggulannya yaitu kelapa sawit dan karet.

Gambar 4.1.1 Peta Wilayah Kerja PT Perkebunan



Sumber: PT Perkebunan Nusantara VIII

Dari semua PTPN yang merupakan induknya adalah PTPN III yang berada di Medan, Sumatera Utara yang bergerak di bidang usaha kelapa sawit dan karet. PTPN III memiliki anak perusahaan yaitu PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Banyak komoditi – komoditi yang dikembangkan oleh PTPN, yang dikembangkan di hampir setiap PTPN adalah kelapa sawit dan karet, dengan komoditi lainnya seperti buah, kakao, etanol, tembakau, kopi, kayu, dan teh. Salah satu perusahaan negara sebagai pengembang komoditi teh terbesar

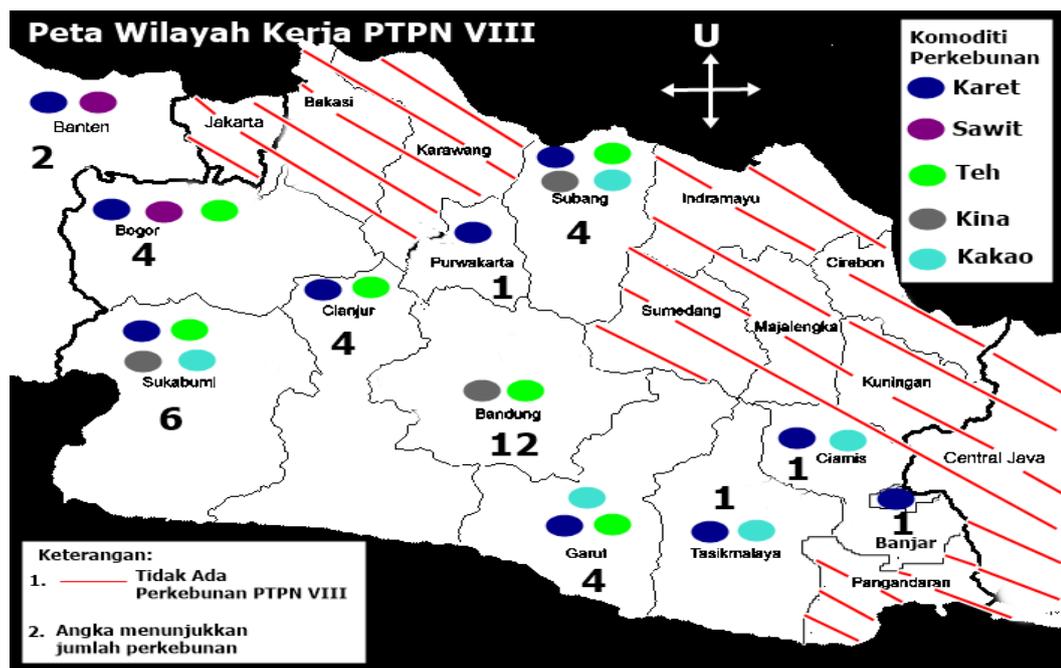
di Indonesia adalah PTPN VIII yang lebih berdomisili di wilayah Jawa Barat dengan kantor pusat yang berada di Bandung.

Meskipun PTP telah berubah menjadi PTPN, tetapi secara status termasuk dalam BUMN perkebunan yang merupakan sebuah perseroan terbatas (PT) BUMN. Perseroan BUMN adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham – saham yang dimiliki oleh pemerintah (seluruh atau sebagian besar), yang bergerak dibidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas.

Karakteristik kegiatan operasional PTPN VIII yaitu melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan yang meliputi kegiatan perusahaan budidaya tanaman, kegiatan produksi, kegiatan perdagangan, kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata dan agrobisnis. Secara garis besar antara PTP dengan PTPN tidak jauh berbeda dari pengembangan pengelolaan perkebunan nusantara, secara tujuan terbentuknya pun sama dengan PTP untuk memajukan komoditi nusantara sebagai komoditi ekspor. Tetapi adanya pergantian ini hanya untuk lebih menstrukturkan perkebunan di Indonesia dengan lebih membagi wilayah kerja dan pengembangan potensi komoditi di setiap wilayah di Indonesia. Diantara PTPN I sampai XIV cara kerja pengelolaannya tidak jauh berbeda, yang membedakan untuk PTPN VIII dengan PTPN lain adalah wilayah kerja dan pengembangan komoditi utama yang lebih kepada komoditi teh. PTPN VIII

memiliki total area tanaman teh mencapai 26.072 hektar. PTPN VIII ini memiliki 41 perkebunan di wilayah Jawa Barat. (Lihat Lampiran 14)

Gambar 4.1.2 Wilayah Kerja PT Perkebunan Nusantara VIII



Sumber: <http://www.pn8.co.id>

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan wilayah PTPN VIII banyak tersebar di Jawa Barat, meskipun terdapat 2 perkebunan di Banten yaitu di Lebak dan Pandeglang. Komoditi yang dihasilkan di setiap wilayah bervariasi, dengan komoditi terbanyak adalah karet dan teh. Banyaknya wilayah perkebunan milik PTPN VIII di Jawa Barat dikarenakan wilayah Jawa Barat yang merupakan dataran tinggi yang cocok untuk wilayah perkebunan. Meskipun beberapa perkebunan di dataran rendah seperti di Subang. Pemasaran hasil komoditi ini tidak hanya di pasaran internasional tetapi juga untuk pasaran lokal.

Dari 41 perkebunan milik PTPN VIII, mengelola 24 perkebunan teh di atas tanah produktif seluas 25.512,02 Ha dan merupakan perkebunan yang cukup luas di 6 kabupaten yakni sukabumi (2 perkebunan), Bogor (2 perkebunan), Cianjur (3 perkebunan), Subang (2 perkebunan), Kab.Bandung dan Kab. Bandung Barat (12 perkebunan) dan Kab.Garut (3 perkebunan). Perkebunan teh menjadi komoditi unggulan yang dimiliki seperti teh Walini dan Teh Goalpara yang dipasarkan di dalam negeri dan juga di ekspor ke pasaran internasional.

B. Penurunan Produksi Perkebunan Teh Gunung Mas

Tahun 1996, PT Perkebunan XII (PTP XII) digantikan oleh PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) yang mengelola perkebunan – perkebunan di Indonesia termasuk Perkebunan Gunung Mas. Prinsip terbentuknya PTPN VIII ini tidak jauh berbeda dengan PTP XII yang mengusahakan peningkatan ekspor komoditi teh Indonesia. Namun, ketika awal pengelolaan PTPN VIII, Indonesia sedang mengalami gejolak ekonomi. Gejolak tersebut adalah krisis moneter yang terjadi mulai tahun 1997. Pada awalnya krisis moneter ini dimulai di Thailand dengan jatuhnya nilai Bath. Kondisi ini justru menyebar ke Indonesia.

Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp. 2.500/US\$, namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bank Indonesia mengakui bahwa tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Pada akhir Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp. 4.000/US\$, nilai tukar rupiah kemudian semakin terpuruk. Pada bulan Januari

1998, rupiah tenggelam hingga level sekitar Rp. 17.000/US\$, atau kehilangan 85% nilainya.²

Meskipun terjadi pergolakan ekonomi, tetapi perkebunan nasional hanya mengalami sedikit penurunan. Tahun 1997, hasil produksi perkebunan nasional sebesar 153.648 ton dari 169.417 pada tahun 1996. Dengan produksi pada perkebunan rakyat pada tahun 1997 mencapai 32.619 ton, perkebunan negara sebesar 88.529 ton, dan perkebunan swasta sebesar 32.770 ton. Di Perkebunan Gunung Mas pun mengalami penurunan produksi mencapai 962.195 ton dari 1.195.908 ton pada tahun 1996.³ Penurunan ini juga mempengaruhi volume dan nilai ekspor teh Indonesia, yaitu:

Tabel 4.2.1 Volume dan Nilai Ekspor 1970 - 2015

Tahun/Year	Ekspor/Export	
	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
1996	101.532	112.342
1997	66.843	88.837
1998	67.219	113.208

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan tabel 4.2.1, volume ekspor teh Indonesia pada tahun 1997 mengalami penurunan yang diiringi oleh penurunan produksi dari tahun 1996. Menurunnya volume ekspor teh Indonesia juga diikuti dengan penurunan nilai

² M. C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2001* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 650.

³ Teh dalam *Statistik Perkebunan Indonesia Tahun 2014 – 2016*, Desember 2016.

ekspornya. Tetapi pada tahun 1998, meskipun terjadi kenaikan volume ekspor teh sebesar 67.219 ton dari 66.843 ton, nilai ekspor teh Indonesia di pasaran internasional kembali naik sebesar 113.208 USD. Ini membuktikan bahwa permintaan ekspor teh Indonesia masih tinggi meskipun terjadinya penurunan produksi dan volume ekspor.

Dengan meningkatnya kembali nilai ekspor teh pada tahun 1998, perkebunan nasional tidak banyak mengalami kerugian akibat adanya krisis moneter yang terjadi. Hal ini dikarenakan orientasi komoditi teh yang merupakan komoditi ekspor, ketika terjadinya krisis moneter yang menyebabkan nilai rupiah jatuh dan nilai USD naik menyebabkan kebutuhan impor pun semakin sulit didapatkan. berbanding terbalik dengan barang- barang ekspor yang tidak terpengaruh hal tersebut, karena barang – barang ekspor berorientasi pada nilai USD. Begitupula dengan Perkebunan Gunung Mas yang walaupun pada tahun 1997 terjadi penurunan produksi, tetapi pada tahun 1998 produksi Perkebunan Gunung Mas kembali meningkat sebesar 1.020.224 ton, yang juga ikut meningkatkan ekspor komoditi teh nasional.⁴

Setelah terjadinya krisis moneter selama tahun 1997 yang memperburuk perekonomian Indonesia, masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966 – 1998) dengan REPELITA – nya pun berakhir. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, perkebunan nasional mengalami peningkatan dengan beralihnya fokus perekonomian negara yang mengutamakan ekspor, terutama tahun 1980 terjadi perubahan ekspor komoditi migas ke komoditi nonmigas yang salah

⁴ Wawancara, Bapak Samsu, Mandor Pengawas/Pemeliharaan Gunung Mas II, 19 Mei 2017.

satunya perkebunan. Perubahan tersebut membawa dampak yang cukup berarti bagi peningkatan pengelolaan perkebunan nasional yang menunjukkan bahwa perkebunan nasional membawa dampak yang sangat penting bagi perekonomian negara.

Kepentingan perkebunan tersebut kembali menjadi topik yang penting ketika Indonesia memasuki masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur (1999 – 2001). Mulai tahun 2000, Perkebunan Gunung Mas mengalami penurunan produksi yang cukup besar. Berikut adalah tabel produksi Perkebunan Gunung Mas dari tahun 1998 – 2001:

Tabel 4.2.2 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Gunung Mas Tahun 1998 – 2001

Tahun	Luas Areal	Produksi Teh
1998	736.40	1.020.224
1999	626.20	894.548
2000	580.10	867.837
2001	580.10	931.780

Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Berdasarkan tabel diatas, produksi yang dihasilkan Perkebunan Gunung Mas mengalami penurunan. Tetapi penurunan ini diikuti oleh penurunan luas areal produksi yang terus mengalami penurunan. Sebelumnya luas areal Perkebunan Gunung Mas pada tahun 1998 mencapai 736.40 ha dengan produksinya sebesar 1.020.224 ton, konsisi ini mengalami penurunan pada tahun 2000 ketika

pemerintahan Gus Dur yaitu sebesar 580.10 ha untuk luas areal dan 867.837 ton untuk produksi yang dihasilkan.

Kondisi tersebut merupakan dampak dari presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur). Pada awal tahun 2000, Gus Dur memberikan pernyataan mengenai persoalan agraria di Indonesia. Dalam pidato kepresidenan di hadapan peserta “Konferensi Nasional Kekayaan Alam” pada Selasa, 23 Mei 2000., pukul 10.00 WIB, di Hotel Indonesia Jakarta, Gus Dur mengemukakan bahwa 40% lahan dari perkebunan harus dibagikan kepada rakyat.⁵ Pengembalian tanah perkebunan ini berdasarkan bahwa tanah milik PTPN VIII merupakan tanah milik pemerintah Belanda yang mana pemerintah Belanda menjarah tanah milik rakyat Indonesia. Padahal tanah milik PTPN ini merupakan tanah negara yang memang sudah dinasionalisasi.

Tetapi dalam pandangan Gus Dur, ia menghimbau bahwa kalau selama ini negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam, maka untuk ke depan sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama. Pernyataan Gus Dur mengenai hal tersebut disampaikan kepada Emil Salim (Ketua Dewan Ekonomi Nasional), yaitu:

Jadi, jangan hanya negara menguasai segala – gala. Negaranya kaya, rakyatnya melarat. Jangan begitu. Kalau mau kaya, kaya bareng. Kalau mau melarat, melarat bareng. Jangan seperti sekarang ini.⁶

Dengan adanya pernyataan dari Gus Dur demikian membawa pengaruh yang negatif bagi perkebunan nasional. Rakyat berfikir bahwa tanah perkebunan

⁵ Kembalikan 40 Persen Tanah PTP pada Rakyat dalam *Kompas*, 24 Mei 2000.

⁶ *Ibid.*

PTPN adalah milik mereka, sehingga membuat masyarakat sekitar melakukan tindakan – tindakan ilegal seperti penjarahan atau penyerobotan lahan – lahan perkebunan. Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengemukakan bahwa sampai September tahun 2000, jumlah luas tanah yang dijarah mencapai 118.830 ha pada perkebunan negara dan 48.051 pada perkebunan swasta.⁷

Penyerobotan lahan ini juga terjadi di Perkebunan Gunung Mas khususnya di Perkebunan Cikopo Selatan. Kasus penjarahan yang banyak terjadi di afdeeling Cikopo Selatan dapat terjadi karena luas areal perkebunannya yang lebih luas dibandingkan afdeeling Gunung Mas I dan Gunung Mas II, membuat kasus penjarahan ini lebih mudah untuk dilakukan masyarakat sekitar. Dengan luas 778 ha, membuat sulit untuk pengawasan secara menyeluruh di afdeeling Cikopo Selatan. Menurut Bapak Husein (Mandor Besar Panen Afdeeling Cikopo Selatan) tindakan penjarahan yang dilakukan masyarakat adalah :

Masyarakat yang melakukan penjarahan lebih bertindak seperti main kucing – kucingan. Maksud kucing – kucingan disini itu misalnya di satu blok sedang digarap maka masyarakat tidak berani untuk menjarah, tapi kalau di blok tersebut sedang tidak digarap oleh kita itulah kesempatan masyarakat untuk menggarap atau menjarah pohon teh tersebut. Ya jadi seperti main kucing – kucingan. Ada orang tidak berani berbuat, kalau tidak ada orang jadi berani untuk berbuat.⁸

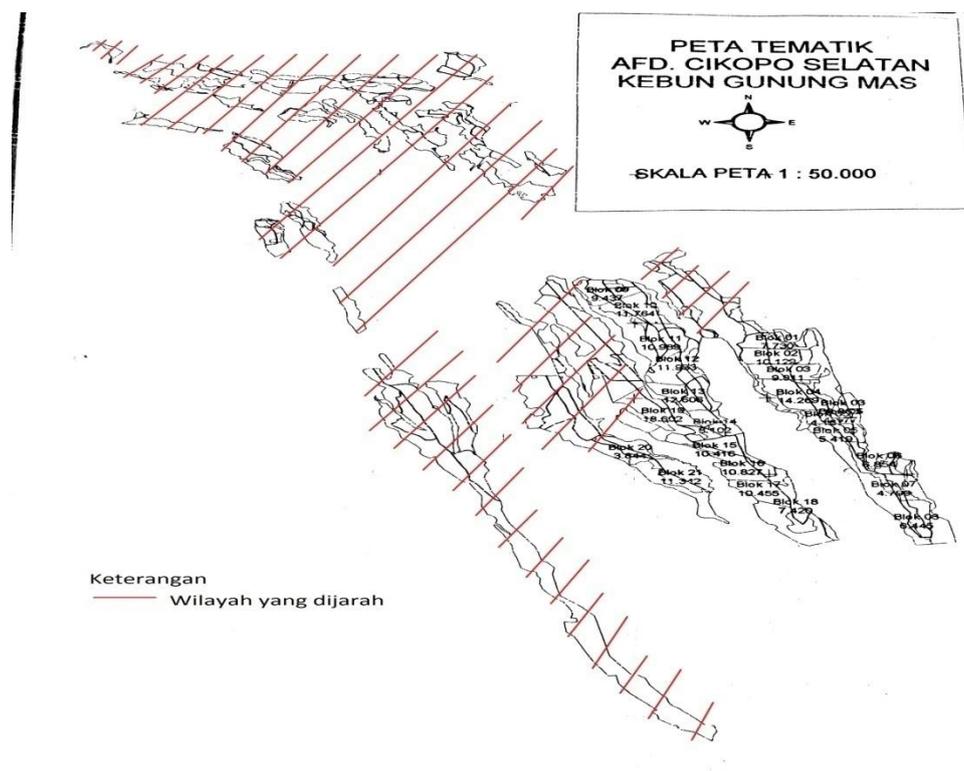
Dengan adanya penjarah ini tidak berarti bahwa Perkebunan Gunung Mas tidak melakukan tindakan keamanan, tetapi tindakan yang dilakukan masyarakat

⁷ Soediono M. P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 441.

⁸ Wawancara, Bapak Husein, Mandor Besar Panen Afdeeling Cikopo Selatan, 16 Mei 2017.

dengan “kucing – kucingan” tersebut membuat luput dari pantauan perkebunan sendiri. Meskipun Perkebunan Gunung Mas sudah mengetahui tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut, tidak membuat masyarakat berhenti melakukan penjarahan. Bahkan lahan perkebunan tersebut tidak lagi digarap hasilnya melainkan diganti menjadi lahan pertanian ataupun untuk membangun rumah, villa, toko, adapun yang dibiarkan menjadi lahan kosong yang ditumbuhi ilalang – ilalang atau rumput – rumput tidak ada lagi pohon teh yang tumbuh di lahan tersebut.

Gambar 4.2.3 Lahan Afdeeling Cikopo Selatan yang Dijarah Oleh Rakyat



Sumber: Hasil olahan peneliti berdasarkan luas areal Afdeeling Cikopo Selatan dari Perkebunan Gunung Mas

Pemikiran masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut semakin diperkuat tidak hanya dari pernyataan Gus Dur tetapi dengan pabrik Perkebunan Cikopo yang sudah terbakar tahun 1970 dan tidak dibangun lagi, maka masyarakat berfikir bahwa perkebunan tersebut sudah tidak aktif. Secara garis besar, penyebab dari aksi penjarahan ini bermula dari hilangnya idealisme sebagai akibat dari krisis ekonomi pada masa Orde Baru yang menyebabkan harga kebutuhan – kebutuhan pokok tinggi dan banyak perusahaan yang bangkrut, sehingga rakyat merasa kesulitan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya. Kondisi ini telah dimanfaatkan provokator yang berdalih akan memperjuangkan perbaikan nasib rakyat kecil demi menegakkan keadilan dan kebenaran, telah meninbulkan gerakan massa liar dan emosional.⁹

Berdasarkan hasil wawancara, sebenarnya masyarakat tidak banyak yang mengetahui mengenai pernyataan dari Presiden Gus Dur tersebut, tetapi adanya pihak – pihak yang menjadi provokator dalam penjarahan yang dilakukan masyarakat. Pihak tersebut yang melakukan tindakan provokasi yang memanfaatkan pernyataan dari Presiden Gus Dur agar masyarakat melakukan penjarahan, yang kemudian lahan perkebunan yang dijarah tersebut diambil alih oleh pihak provokator dengan melakukan praktek jual beli lahan dengan masyarakat, padahal masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah tersebut. Lahan yang diperjualbelikan tersebut ada yang berupa lahan ataupun yang sudah didirikan bangunan oleh masyarakat. Penjarahan ini bukanlah dampak dari adanya krisis ekonomi pada tahun 1998, karena daerah puncak merupakan kawasan

⁹ Soediono M. P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *op.cit.*, hlm. 442.

wisata dan banyak lahan pertanian maupun perkebunan sehingga dengan pemanfaatan kawasan wisata masyarakat Puncak masih bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata yang juga didatangi oleh wisatawan mancanegara.

Mengingat daerah Perkebunan Gunung Mas yang berada di kawasan Puncak menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ibukota Jakarta dengan wilayah pegunungan yang memiliki udara yang dingin dan pemandangan yang indah yang tidak dapat dirasakan di ibukota Jakarta. Terutama ketika hari – hari libur dimanfaatkan untuk tempat berkunjung dengan menginap di villa – villa di kawasan Puncak ataupun mengunjungi tempat wisata seperti Taman Matahari dan Taman Safari. Sehingga banyak sekali masyarakat Jakarta yang bahkan membeli lahan atau villa – villa di kawasan tersebut sebagai tempat peristirahatan di waktu liburan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar perkebunan yang menjarah lahan tersebut mulai menjual – belikan lahan perkebunan, baik yang masih berupa lahan kosong ataupun sudah dibangun villa – villa. Kebanyakan pihak – pihak yang menjadi provokator adalah pihak – pihak yang memiliki kedudukan yang tinggi di pemerintahan yang kebanyakan berasal dari ibukota Jakarta.¹⁰

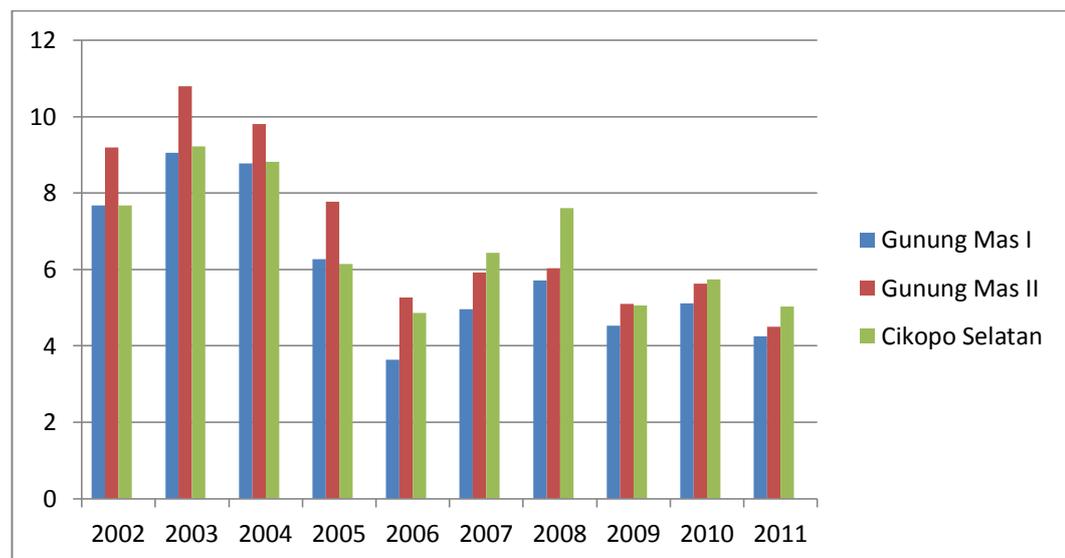
Akibat penjarahan tersebut, lahan Perkebunan Cikopo Selatan yang merupakan yang terluas dibandingkan afdeeling Gunung Mas lainnya menjadi afdeeling yang lebih kecil, dari 778 ha menjadi 107 ha yang bisa digarap.¹¹ Dengan penyerobotan tersebut muncul suatu kondisi yang menguntungkan

¹⁰ Wawancara, Bapak Dida Indrawan, Tim Aset Perkebunan Gunung Mas, 26 Juli 2017.

¹¹ Wawancara, Bapak Deni Rijal, Mandor Perawatan Perkebunan Cikopo Selatan dan Tim Aset Perkebunan Gunung Mas, 17 Mei 2017.

masyarakat sekitar perkebunan tetapi merugikan perkebunan itu sendiri yang hasil produksinya telah mengalami penurunan akibat lahan yang berkurang. Tidak hanya berkurangnya produksi, Perkebunan Gunung Mas juga mengalami kerugian dengan luas lahan yang tercatat di BPM (Badan Petanahan Nasional) seluas 778 ha yang harus membayar pajak dari tanah seluas 778 ha yang pada kenyataannya lahan tersebut tidak sepenuhnya bisa digarap hasilnya oleh Perkebunan Gunung Mas. Disamping itu juga faktor permasalahan perekonomian Indonesia yang belum stabil pasca Orde Baru menambah penurunan pengelolaan perkebunan.

Grafik 4.2.1 Produksi Perkebunan Gunung Mas 2002 – 2011



Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Berdasarkan tabel diatas, penurunan produksi dan luas areal yang dimiliki Perkebunan Gunung Mas memang tidak secara langsung terjadi pasca adanya pernyataan dari Gus Dur. Seperti yang sudah dijelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan masyarakat secara “kucing – kucingan” baru berdampak di tahun –

tahun setelah berakhirnya pemerintahan Gus Dur pada tahun 2001. Penurunan yang terjadi pun tidak mengalami penurunan yang sangat drastis tetapi adanya pasang surut setiap tahunnya.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya penjarahan ini tidak hanya dari berkurangnya luas areal dan produksi tetapi juga adanya penurunan jumlah tenaga kerja. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tenaga kerja yang berada di Perkebunan Gunung Mas terbagi menjadi dua yaitu pekerja tetap dan pekerja sewa. Dengan penurunan lahan dan produksi ini para pekerja juga merasa dirugikan terutama pekerja sewa. Para pekerja sewa yang biasanya bekerja karena produksi yang melimpah dengan kebutuhan tenaga kerja yang banyak, membuat kondisi ini berubah. Dengan berkurangnya produksi akibat lahan yang berkurang, kebutuhan akan tenaga kerja pun berkurang, maka pekerja sewa ini telah kehilangan pekerjaannya, apalagi upah yang diterima pekerja sewa berasal dari penjualan hasil produksi. Tetapi jika produksi berkurang, maka berkurang pula penghasilan yang di dapat oleh perkebunan untuk memberikan upah kepada pekerja sewa. Contoh kasus di Perkebunan Cikopo Selatan yang memiliki luas areal mencapai 700 ha membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang bahkan mencapai 600 pekerja sewa, tetapi ketika dimulainya penjarahan dan lahan pun berkurang hingga 107 ha maka pekerja sewa ini tidak dibutuhkan lagi.¹²

Berkurangnya jumlah tenaga kerja terutama pekerja sewa di perkebunan merupakan suatu permasalahan tenaga kerja yang muncul akibat suatu sebab. Akan tetapi, permasalahan tenaga kerja di Perkebunan Gunung Mas ini tidak

¹² *Ibid.*

cukup dengan berkurangnya jumlah pekerja sewa, permasalahan lain yang muncul adalah berkurangnya jumlah pekerja tetap. Berkurangnya pekerja tetap Perkebunan Gunung Mas bukan merupakan akibat dari penjarahan, melainkan adanya suatu pemikiran yang muncul dari masyarakat mengenai pekerjaan di perkebunan. Pekerja tetap perkebunan biasanya adalah pekerja yang sudah bekerja secara turun – temurun di perkebunan. Wilayah pegunungan memang banyak dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan karena iklim di pegunungan yang cocok untuk itu. Sehingga, perkebunan merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar pegunungan untuk mencari nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pegunungan sangat menggantungkan kehidupannya di perkebunan, jadi tidak heran bila tenaga kerja di pegunungan dilakukan secara turun temurun.

Seiring dengan perkembangan pendidikan, memunculkan suatu pemikiran yang berbeda bagi masyarakat pegunungan. Masyarakat menganggap pekerjaan di perkebunan tidak menguntungkan lagi. Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik terutama di ibukota yang kebanyakan pola pikir masyarakat pedesaan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika bekerja di ibukota. Oleh karena itu, banyak anak – anak dari pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas yang tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan sebagai pemetik teh seperti orang tuanya. Tidak hanya anak – anak pemerik teh saja bahkan para ibu – ibu pemetik teh pun tidak mau anak – anak mereka bekerja di perkebunan. Para pemetik teh merasa kasihan jika anak – anak mereka harus bekerja di perkebunan, apalagi medan yang harus dihadapi di

perkebunan sangat terjal dan akan memburuk jika datang hujan yang membuat jalan di perkebunan semakin licin. Mereka berfikir agar anak – anak mereka memiliki pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan diluar perkebunan seperti di ibukota apalagi dengan adanya krisis ekonomi pasca Orde Baru.¹³

Kondisi ini terjadi di seluruh afdeeling Gunung Mas, namun berdasarkan hasil wawancara dengan kepala afdeeling, mandor dan pemetik teh, hanya di afdeeling Gunung Mas I yang masih banyak pekerja yang bekerja secara turun – temurun dibandingkan afdeeling Gunung Mas II dan Cikopo Selatan. Alasannya adalah di afdeeling Gunung Mas I merupakan afdeeling yang memiliki agrowisata berupa villa penginapan, areal rekreasi anak seperti kolam berenang, areal camping, areal berkuda, terbang layang dan lainnya. Dengan berbagai fasilitas dari agrowisata tersebut telah menarik banyak wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung ke Gunung Mas. Agrowisata tersebut tidak ada di afdeeling lainnya (Gunung Mas II dan Cikopo Selatan) karena wilayah Gunung Mas II yang terjal dibandingkan Gunung Mas I yang wilayahnya lebih datar sehingga tidak membahayakan dan wilayah Cikopo Selatan yang terpisah dari kantor induk agrowisata Gunung Mas yang memang berada di Gunung Mas I. Adanya agrowisata tersebut membuat anak – anak dari pemetik teh masih mau bekerja di perkebunan yang bisa saja mereka bekerja di agrowisata ataupun membuka toko – toko disekitar perkebunan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan saat liburan. Berbeda dengan afdeeling Gunung Mas II dan Cikopo Selatan yang tidak

¹³ Wawancara, Ibu Nana dan Ibu Eshi, Pemetik Teh Gunung Mas II, 10 Mei 2017.

memiliki agrowisata sehingga pekerjaan di perkebunan hanya sebagai mandor ataupun pemetik teh.¹⁴

Di satu sisi permasalahan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan Indonesia, yang sebelumnya masyarakat tidak mau untuk menempuh pendidikan yang tinggi yang kebanyakan hanya mencapai Sekolah Dasar saja sudah cukup bagi masyarakat pedesaan. Tetapi di sisi lain, tidak adanya generasi penerus perkebunan ini membuat jumlah tenaga kerja tetap perkebunan semakin berkurang. Ketika masa PTP, jumlah tenaga kerja Perkebunan Gunung Mas seperti mandor mencapai 4 mandor di 1 afdeeling dengan jumlah pemetik teh mencapai 40 orang untuk 1 mandor. Di masa PTPN, jumlah tenaga kerja semakin menurun yang hanya memiliki 2 mandor untuk 1 afdeeling dengan 15 orang pemetik teh untuk 1 mandor. Bahkan, terjadi suatu kasus misalnya di Gunung Mas I sedang mengalami kekurangan pemetik teh, sedangkan jumlah pucuk teh yang sedang panen melimpah, maka pekerja di afdeeling lain seperti Gunung Mas II akan ikut membantu di Gunung Mas I. Jadi, tenaga kerja ini bekerja secara kondisional, tidak seperti sebelumnya menggunakan pekerja sewa, karena tidak lagi menggunakan pekerja sewa dan kekurangan pekerja tetap maka pemetik teh pun dialihkan untuk saling membantu di semua afdeeling Gunung Mas.

Selain permasalahan tenaga kerja, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di afdeeling Gunung Mas II yaitu permasalahan Hak Guna Bangunan (HGB). Adanya penjarahan lahan akibat pernyataan presiden Gus Dur

¹⁴ Wawancara, Bapak Ayi Nyanyang, Kepala Afdeeling Gunung Mas I dan Bapak Aceng Ahya, Kepala Afdeeling Gunung Mas II, 17 Mei 2017.

tahun 2000, juga berdampak pada afdeeling Gunung Mas II. Masyarakat sekitar pegunungan yang tidak mau lagi bekerja di perkebunan, akhirnya beralih profesi sebagai pengusaha atau pedagang, yang melakukan penyerobotan lahan perkebunan untuk membangun toko – toko di pinggir jalan Raya Puncak. Letak toko – toko tersebut sangat berdekatan dengan areal perkebunan, apalagi kebun – kebun teh di afdeeling Gunung Mas II beberapa arealnya berada di pinggir jalan kawasan Puncak. Kawasan Puncak ini memang menjadi objek wisata domestik dan mancanegara karena wilayahnya yang berada di pegunungan yang menjadi daya tarik dari kawasan ini. Dengan dijadikannya kawasan wisata, banyak para masyarakat yang membuka toko – toko makanan pinggir jalan yang menampilkan keindahan dari wilayah pegunungan. Usaha membuka toko ini lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan bekerja di perkebunan. Namun, toko – toko yang berada di pinggir jalan tersebut menimbulkan permasalahan lain dengan mengganggu pekerjaan di perkebunan.

Kasus yang muncul di afdeeling Gunung Mas II adalah jika pucuk teh yang berada di pinggir jalan sedang panen dan aktivitas wisatawan yang datang ke kawasan Puncak sedang ramai, maka akan mengganggu akses truk pengangkut teh tersebut. Kondisi tersebut diperparah saat toko – toko tersebut sedang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tidak hanya mengganggu akses pengangkutan teh tetapi toko – toko tersebut dibangun secara ilegal bahkan mengambil lahan milik afdeeling Gunung Mas II yang membuat pengurangan lahan perkebunan.

Permasalahan HGB yang terjadi di afdeeling Gunung Mas II ini muncul karena adanya faktor eksternal. Adapun kasus mengenai HGB ini juga muncul di

afdeeling Cikopo Selatan. Perbedaannya adalah di afdeeling Cikopo Selatan disebabkan oleh faktor internal. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa PTPN VIII memberikan fasilitas bagi pekerjanya berupa rumah dinas. Rumah dinas ini dihuni oleh pekerja tetap Perkebunan Gunung Mas yang biasanya kepemilikannya dilakukan secara turun – temurun bila keluarga dari seorang pekerja juga bekerja di Perkebunan Gunung Mas. Tetapi, dengan kurangnya minat dari pekerjaan di perkebunan membuat keluarga pemetik teh tidak meneruskan pekerjaan di perkebunan melainkan di tempat lain yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Tetapi rumah dinas yang diberikan oleh PTPN VIII ini masih ditempati oleh mereka yang tidak bekerja di perkebunan. Padahal ada peraturan dalam perjanjian kontrak antara pihak perkebunan dengan pekerjanya bahwa jika sudah tidak bekerja di perkebunan atau memasuki masa pensiun tidak boleh menempati rumah dinas yang diberikan, akan diberikan waktu selama 3 bulan untuk proses perpindahan.¹⁵ Karena merasa bahwa rumah tersebut sudah yang ditempati secara turun – temurun, merasa bahwa rumah tersebut menjadi rumah sendiri. Permasalahan tersebut tampaknya merugikan perkebunan, tetapi pekerja yang masih aktif di perkebunan tidak merasakan hal demikian. Para pekerja di afdeeling Cikopo banyak yang lebih memilih tinggal di desa – desa sekitar perkebunan dibandingkan tinggal di perumahan yang diberikan PTPN VIII dengan alasan lebih nyaman menempati rumah mereka sendiri. Sehingga pemetik

¹⁵ Wawancara, Bapak Edi Sukardi, Kepala Bagian Tanaman, Asisten Administrasi Perkebunan Gunung Mas, 27 April 2017.

teh di afdeeling Cikopo Selatan lebih banyak yang tinggal diluar areal perkebunan dibandingkan di perumahan dalam areal perkebunan.¹⁶

Berbagai permasalahan yang timbul di Perkebunan Gunung Mas sangat beragam di setiap afdeeling. Meskipun permasalahan di setiap afdeeling berbeda – beda, tetapi dampak yang ditimbulkan akan sangat mempengaruhi Perkebunan Gunung Mas baik permasalahan internal maupun eksternal seperti adanya pengurangan jumlah lahan perkebunan, penurunan produksi, penurunan jumlah tenaga kerja, dan bentrokan antara masyarakat sekitar dengan perkebunan. Semua permasalahan di Perkebunan Gunung Mas ini tidak muncul karena satu sebab tetapi banyak sebab yang saling berkaitan satu sama lainnya.

C. Upaya Mempertahankan Perkebunan

Penurunan produksi yang terjadi di Perkebunan Gunung Mas telah menimbulkan dampak yang serius. Sebagai salah satu perkebunan yang mengolah hasil produksinya, penurunan produksi tersebut mengakibatkan ditutupnya pabrik Perkebunan Gunung Mas. Pabrik Perkebunan Gunung Mas sebelumnya menjadi salah satu pabrik yang mengolah produk unggulan PTPN VIII yaitu Teh Walini yang diekspor ke pasaran internasional dari jumlah 26.000 hektar perkebunan yang dimiliki PTPN VIII sebanyak 3% hingga 5% yang diproduksi untuk Teh Walini. Teh Walini ini diekspor sebanyak 45% ke negara – negara di Eropa dan 20% ke Amerika Serikat.¹⁷ Tidak hanya Teh Walini, hasil produksi teh di

¹⁶ Wawancara, Ibu Yati, Ibu Yana, dan Ibu Ooy, Pemetik Teh Cikopo Selatan, 18 Mei 2017.

¹⁷ Pemasaran Produk Teh Walini Digenjot dalam *Kompas* (Jakarta), 25 Maret 2010.

Perkebunan Gunung Mas dikirim ke Perkebunan Goalpara di Sukabumi untuk menghasilkan Teh Goalpara yang juga diekspor oleh PTPN VIII.

Penutupan pabrik tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh PTPN VIII yang memberikan batas untuk suatu perkebunan untuk dapat mengolah hasil produksinya apabila hasil panen mencapai 15 ton tiap tahunnya.¹⁸ Akan tetapi, Perkebunan Gunung Mas yang terus mengalami penurunan produksi (lihat grafik 4.1) hanya menghasilkan produksi sebanyak 5 ton tiap tahunnya yang sebelumnya mencapai 30 ton.¹⁹ Dengan ditutupnya pabrik, Perkebunan Gunung Mas hanya menghasilkan tanaman basah yang belum diolah. Hasil produksi Perkebunan Gunung Mas yang dihasilkan untuk diolah, dialihkan ke perkebunan lain yang memiliki pabrik pengolahan yaitu di Perkebunan Panyairan, Cianjur, yang juga merupakan perkebunan milik PTPN VIII. Penurunan produksi ini tidak lepas dari berkurangnya lahan perkebunan khususnya di afdeeling Cikopo Selatan yang terjadi akibat penjarahan.

Meskipun, terjadinya penurunan luas areal perkebunan, tidak berarti Perkebunan Gunung Mas tidak melakukan apa pun untuk memulihkan lahan perkebunan yang dijarah masyarakat. Manager yang kedudukannya sebagai pimpinan di Perkebunan Gunung Mas melaporkan tindakan penjarahan tersebut ke pihak berwajib yang kemudian melaporkannya ke PTPN VIII. Tidak hanya itu, Manager Perkebunan Gunung Mas membentuk Tim Inventaris Aset yang melakukan beberapa tindakan antara lain:

¹⁸ Wawancara, Bapak Edi Sukardi, Kepala Bagian Tanaman, Asisten Administrasi Perkebunan Gunung Mas, 27 April 2017.

¹⁹ Wawancara, Bapak Yana H. R, Pengawas Intern Kebun Perkebunan Gunung Mas, 5 Mei 2017.

1. Pendataan orang – orang yang memiliki lahan yang merupakan lahan Perkebunan Gunung Mas. Pendataan ini dilakukan dengan kerjasama antara pihak perkebunan dengan pihak kepala desa. Dari pihak kepala desa akan mendata orang – orang yang melakukan penjarahan dan berapa luas lahan yang dijarah yang akan diberikan datanya ke perkebunan
2. Pendekatan secara konservatif. Perkebunan Gunung Mas tidak mau melakukan langkah yang gegabah dengan langsung membawa permasalahan ini melalui jalur hukum/pengadilan dengan alasan akan lebih rumit dan lama waktu penyelesaiannya. Sehingga perkebunan hanya melakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat yang melakukan penjarahan dengan memberikan surat teguran. PTPN VIII memberikan surat teguran kepada pihak yang mengambil lahan perkebunan dengan 3 teguran, apabila hingga teguran ketiga masyarakat tidak menanggapi maka akan tindakan penjarahan yang dilakukan masyarakat tersebut dianggap kriminal dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, pihak PTPN VIII pun bersedia membuka peluang Kerjasama Operasional (KSO) dengan masyarakat berdasarkan UU Perkebunan No. 39 tahun 2014 pasal 107 yang dikeluarkan oleh BUMN, dengan syarat:
 - a. Mengakui tanah tersebut merupakan lahan HGU Perkebunan Gunung Mas.
 - b. Tidak menjualbelikan lahan tersebut.

- c. Bilamana PTPN VIII membutuhkan lahan tersebut, maka tidak akan mengganti kerugian.

Kedua cara yang dilakukan Tim Inventaris Aset sangat penting dilakukan agar dapat mempertahankan Perkebunan Gunung Mas. Hal tersebut dilakukan Perkebunan Gunung Mas ketika SK HGU Nomor: 56/HGU/BPN/2004-A-3 tanggal 23 Juni 2008 mengenai inventarisasi lahan HGU PT Perkebunan Nusantara VII Kebun Gunung Mas mulai dikeluarkan, yang sebelumnya pada tahun 1997 SK HGU tersebut berakhir masanya. Kepemilikan lahan ini dipertegas dengan adanya Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno, yang isinya adalah meluaskan kekuasaan modal pada penguasaan dan kepemilikan agraria.²⁰ Jadi, jelas PTPN VIII yang termasuk dalam perusahaan yang memiliki modal investasi ini memiliki hak atas tanahnya. Yang berarti tindakan penjarahan dengan mengambil lahan PTPN VIII merupakan tindakan kriminal.

Namun, pihak PTPN VIII lebih bertindak secara hati – hati dan tidak ingin mengarahkan kasus penjarahan ke jalur hukum karena dianggap proses yang rumit dan memakan waktu yang panjang.²¹ Oleh sebab itu PTPN VIII dan Perkebunan Gunung Mas lebih bertindak dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Dengan keluarnya UU Perkebunan No. 39 tahun 2014 pasal 107 yang dikeluarkan oleh BUMN, pihak perkebunan lebih mengutamakan melakukan KSO yang

²⁰ Serikat Petani Indonesia, “Evaluasi Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBY-JK Tahun 2004-2009: Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterahkan Petani”, (Artikel, Serikat Petani Indonesia, 2009)

²¹ Wawancara, Bapak Toni S, Tim Aset Perkebunan Gunung Mas, 5 Juli 2017.

memungkinkan untuk masyarakat melakukan sewa tanah kepada pihak perkebunan, sehingga masyarakat juga dapat berkontribusi kepada perkebunan yang hasilnya untuk negara juga. Karena lahan perkebunan yang dijarah setiap tahunnya dibayarkan pajaknya oleh Perkebunan Gunung Mas, padahal hasil dari lahan tersebut tidak bisa diperoleh, yang mengakibatkan kerugian. Sehingga dengan adanya KSO, Perkebunan Gunung Mas tetap bisa mengambil hasil lahan perkebunannya dari biaya sewa yang dibayarkan oleh masyarakat dan masyarakat pun tetap bisa menggunakan lahan perkebunan yang dijarah untuk kepentingan pribadi.

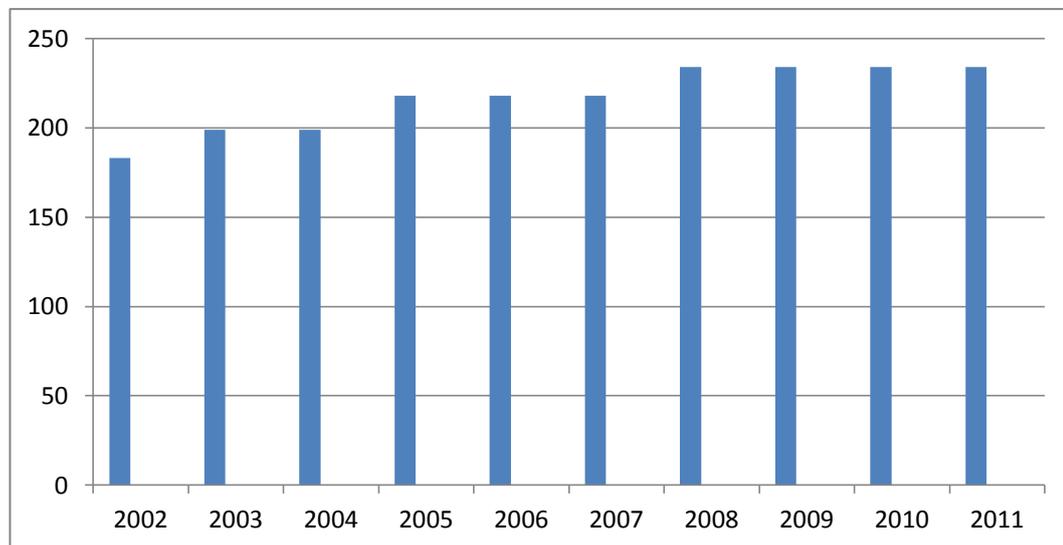
Tindakan – tindakan pengembalian lahan perkebunan yang dijarah merupakan adanya kontribusi dari pihak manager yang melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan kepala desa untuk menangani penjarahan ini agar dapat mengembalikan lahan perkebunan yang sudah diambilalih. Pihak PTPN VIII pun menanggapi laporan manager Perkebunan Gunung Mas perihal permasalahan penjarahan tersebut yang kemudian mengeluarkan surat terguran untuk masyarakat. Memang dari segi pengelolaan perkebunan, manager hanya melakukan pelaporan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan perkebunan, tetapi tindakan yang dilakukan oleh manager perkebunan harus berdasarkan perintah dari perusahaan perkebunan (PTPN VIII) yang lebih berwenang menangani perkebunan yang dimilikinya.²²

Tampaknya manager Perkebunan Gunung Mas, kurang bertindak tegas dan lambat dalam menangani kasus penjarahan ini. Tim inventaris aset sebenarnya

²² Wawancara, Bapak Dida Indrawan, Tim Aset Perkebunan Gunung Mas, 26 Juli 2017.

sudah terbentuk sejak sebelum HGU perkebunan berakhir pada tahun 1997, tetapi hanya melakukan pendataan luas areal saja. Berbeda dengan kondisi ketika sudah banyak terjadi penjarahan lahan, tim ini baru memfokuskan tugas untuk melakukan pendataan dan pendekatan untuk melakukan KSO. Menager perkebunan tidak melakukan tindakan apa pun selain melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan PTPN VIII.

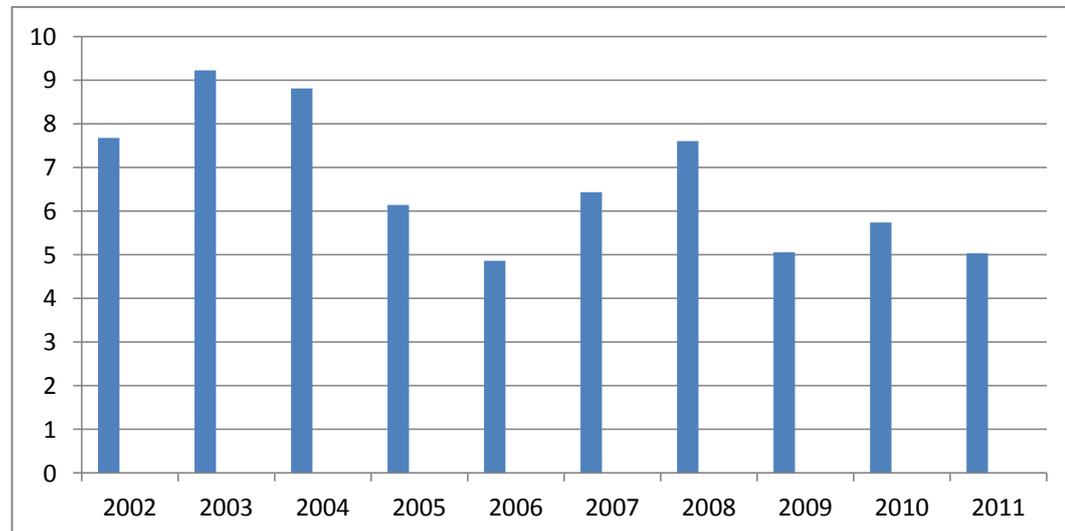
Seperti pada lampiran 1, luas areal Perkebunan Gunung Mas mulai mengalami penurunan secara terus menerus mulai dari tahun 2008 seluas 657.42 hingga 2014 seluas 319.85 ketika masa Manager Ir. Hendra Mardiana. Hal tersebut juga menyebabkan produksi teh pun menurun dari tahun 2008 sebanyak 946,806 Kg menjadi 366,103 Kg pada tahun 2014. Meskipun di tahun – tahun sebelum 2008 luas areal Perkebunan Gunung Mas mengalami stagnan pada tahun 2005 hingga 2007 tetapi dari produksi tahun 2007 pada masa Manager Ir. Tri Bagus Santoso mulai adanya peningkatan sebanyak 822,509 Kg dari 634,857 Kg pada tahun 2006 ketika masa Manager Ir. Haryusdianto Eka Putra. Memang adanya peningkatan produksi dan tidak adanya pengurangan luas areal pada tahun 2007 tidak berarti tindakan penjarahan terhenti dilakukan masyarakat, terlebih tindakan penyelesaian tersebut baru dilakukan setelah tahun 2008.

Grafik 4.3.2 Luas Areal Afdeeling Cikopo Selatan Tahun 2002 – 2011

Sumber: Perkebunan Gunung Mas

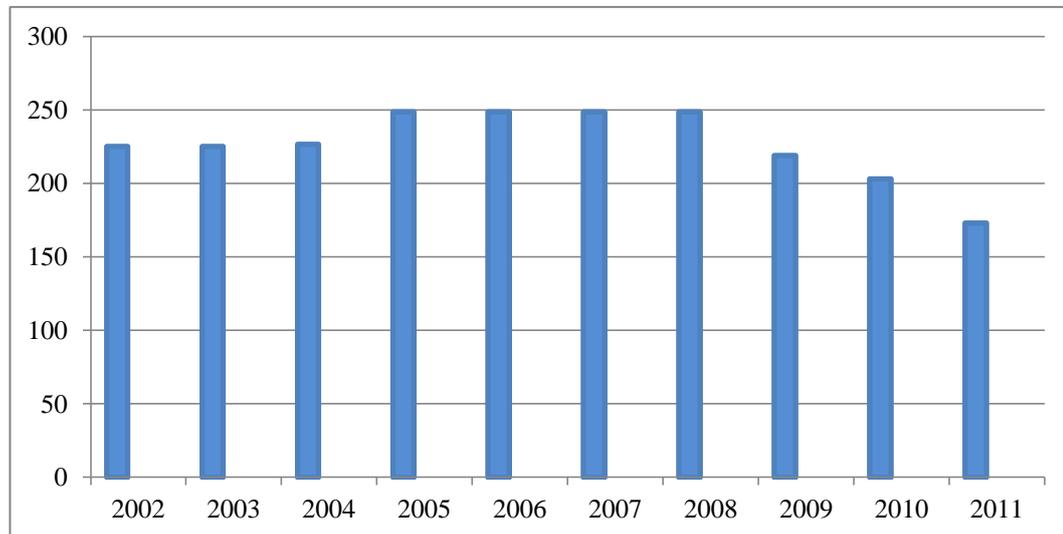
Terlepas dari tindakan yang lambat dalam penanganan kasus penjarahan, berdasarkan grafik diatas, usaha pendekatan tampaknya mulai berhasil mengembalikan lahan afdeeling Cikopo Selatan yang semakin meningkat luas areal penggarapannya. Meskipun, lahan perkebunan yang dipulihkan meningkat tidak mengalami peningkatan yang drastis tetapi sudah cukup berhasil. Namun, dari segi produksi, afdeeling Cikopo Selatan masih mengalami penurunan. Seperti yang tertera di grafik 4.3.3 dibawah ini.

Grafik 4.3.3 Produksi Afdeeling Cikopo Selatan tahun 2002 – 2011



Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Belum adanya peningkatan produksi di afdeeling Cikopo Selatan ini tidak membuat PTPN VIII berupaya meningkatkan hasil produksi dari perkebunannya. Pada tahun 2011, PTPN VIII melakukan upaya pengalihan tanaman dengan menanam komoditi lain seperti alpukat, kopi, jeruk dan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk pemanfaatan lahan secara maksimal, terutama lahan yang sudah tidak dapat memproduksi teh. Penanaman komoditi tersebut masih bersifat percobaan. Penanam komoditi lain ini berada di afdeeling Gunung Mas I dan Gunung Mas II. (Lihat lampiran 11 dan 12)

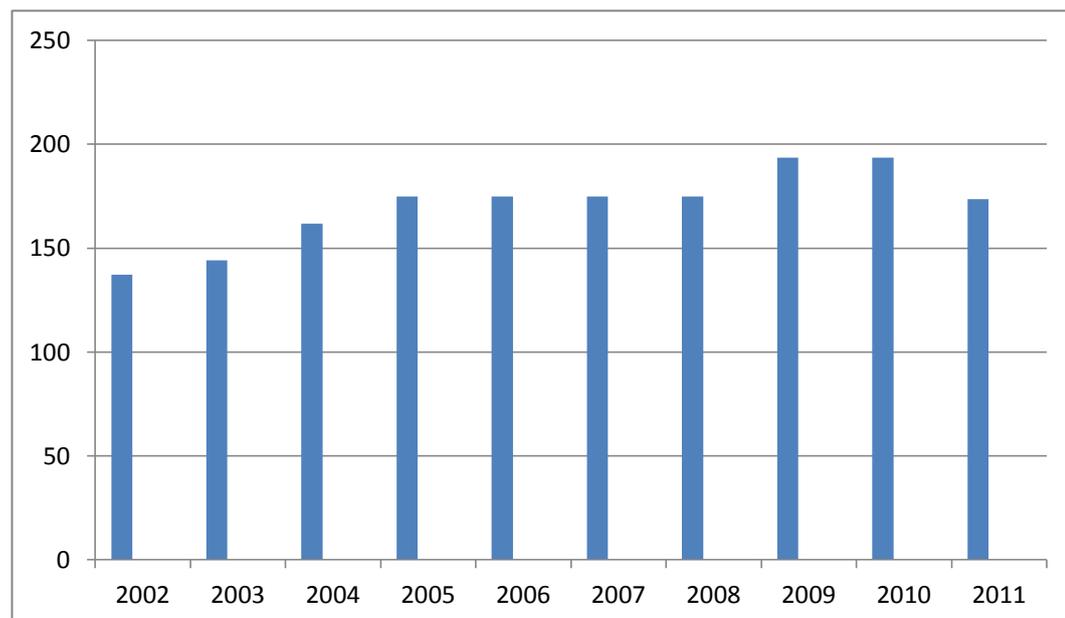
Grafik 4.3.4 Luas Areal Afdeeling Gunung Mas I Tahun 2002 – 2011

Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Grafik diatas menunjukkan pada tahun 2009 terjadi penurunan luas areal afdeeling Gunung Mas I. Oleh sebab itu, pada tahun 2011 PTPN VIII melakukan pengalihan komoditi lain untuk lebih memanfaatkan lahan yang ada, terutama pemanfaatan lahan yang sudah tidak memproduksi teh. Selain itu, permasalahan toko – toko sekitar afdeeling Gunung Mas II juga diselesaikan oleh pihak perkebunan dengan Pemerintah Daerah Bogor. Selain, mengganggu akses perkebunan, jika semakin banyak toko – toko yang dibangun maka akan membuat penyempitan jalan. Oleh sebab itu, pihak perkebunan memberikan himbauan berupa larangan atau peringatan kepada masyarakat bahwa toko yang sudah dibangun tidak akan dihancurkan oleh pemerintah daerah tetapi masyarakat tidak boleh membangun kembali atau memperbanyak toko – toko di pinggir jalan sekitar perkebunan. Himbauan tersebut tampaknya berhasil untuk mengurangi penyerobotan lahan yang membuat penyempitan lahan perkebunan, seperti pada

grafik 4.5 dibawah ini, lahan afdeeling Gunung Mas II yang menurun sejak penjarahan yang terjadi di tahun 2000 berhasil meningkat sedikit demi sedikit.

Grafik 4.3.5 Luas Areal Afdeeling Gunung Mas II Tahun 2002 – 2011



Sumber: Perkebunan Gunung Mas

Berbagai upaya yang dilakukan PTPN VIII untuk Perkebunan Gunung Mas tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak seperti kepala desa dan pemerintah daerah. Permasalahan yang begitu banyak di setiap afdeeling Gunung Mas ini memerlukan tindakan – tindakan yang secara tegas untuk mengatasi permasalahan eksternal yang muncul. Pihak perkebunan sendiri belum melakukan tindakan – tindakan penyelesaian atas permasalahan internal seperti kepemilikan rumah dinas di afdeeling Cikopo Selatan. Jadi, perkebunan berupaya untuk menyelesaikan kasus yang penting untuk dapat meningkatkan produksi perkebunan yang semakin menurun.